



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT



SUARA KITA
MASA DEPAN
JAKARTA

Rakus
27
November
2024



Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024



PEMUTAKHIRAN LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT KPU KOTA JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I	9
A.Latar Belakang	9
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	10
C.Struktur Organisasi	12
D.SISTEMATIKA.....	18
BAB II	20
A. Rencana Strategis.....	20
B. Prioritas Nasional.....	23
C.Perjanjian Kinerja.....	23
D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	26
BAB III	29
A. Pengukuran Capaian Kinerja	29
B.Analisis Capaian Kinerja	35
BAB IV	47
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat tahun 2024, telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat berupaya melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam bentuk akuntabilitas pengukuran kinerja dan evalausi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis 4embaga4r kinerja utama. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 4embag dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat pada Tahun 2024 diidentifikasi berhasil mewujudkan target kinerja 4embaga, tercapainya program kerja dan hasil kegiatan proses dengan realisasi sasaran strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Jakarta Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ evaluasi dan perbaikan sehingga KPU Kota Jakarta Barat di masa mendatang dapat mewujudkan capaian kinerja dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas, untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Jakarta, 11 Januari 2025

Sekretaris
KPU Kota Jakarta Barat

Adnan Nurba Tjenreng

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024, dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, berdasarkan Rencana Strategi Jangka Menengah 2020-2024 KPU Kota Jakarta yang ditetapkan. Tingkat capaian dari 12 indikator kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terlaksananya Regulasi/Peraturan yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia;
2. Terlaksananya pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik;
3. Tersusunnya Laporan Keuangan dengan baik dan benar serta penyampaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu;
4. Keterbukaan Informasi Publik;
5. Tercapainya partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Tercapainya Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Terpenuhi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.
9. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang berlaku.
10. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan di Wilayah Kecamatan/Kelurahan yang aman dan damai.
11. Terlaksananya sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat.

Penyebab tidak terlaksananya indikator kinerja secara 100% kegiatan dimaksud diantaranya dikarenakan kegiatan bersifat kondisional (sesuai kebutuhan riil).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Anggaran yang masih bersifat top down sehingga pada beberapa kebutuhan yang tidak dapat terfasilitasi secara memadai.

2. Beberapa kegiatan dimana KPU Kota hanya sebagai penyelenggara pemilu yang
3. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dimana sebagian tugas dan kewajibannya terdapat hal yang bersifat kondisional, sehingga sangat memungkinkan bahwa akan ada output yang tidak dapat terlaksana secara sempurna.
4. Terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak disediakan dari awal, kemudian terdapat tambahan anggaran di triwulan akhir tahun 2024, sehingga Satker harus berusaha keras untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan melaksanakan banyak kegiatan dalam waktu yang sangat singkat. Dari kondisi tersebut diharapkan dapat diberikan ruang koordinasi yang lebih memadai sehingga penyusunan rencana kegiatan di KPU Kota harus lebih optimal.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024 adalah sebesar 99,9 %. Terdapat 11 IKK yang dapat diukur sampai Tahun 2024, yaitu :

1. IKK.1 Tersedianya pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan sistematika dan standar logistik Pemilu/Pemilihan.
2. IKK.2 Tersedianya data kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
3. IKK.3 Terlaksananya pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.
4. IKK.4 Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan parpol peserta Pemilihan Umum.
5. IKK.5 Terwujudnya persentase pengelolaan JDIH di Tingkat KPU Kota Jakarta Barat.
6. IKK.6 Tersedianya penerbitan bahan informasi dan klipring kepemiluan dan
7. pemilihan gubernur.
8. IKK.7 Terlaksana dengan tepat waktu pembayaran Honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.
9. IKK.8 Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.

- 10.IKK.9 Terlaksananya Pemutakhiran data pemilih.
11. IKK.10 Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan anggaran tepat waktu dan sesuai dengan skema program perencanaan.
12. IKK.11 Terlaksananya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT



BAB I

PENDAHULUAN



SUARA KITA
MASA DEPAN
JAKARTA

Realisasi
27
November
2024



BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka sebagai lembaga negara KPU Kota Jakarta Barat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dan sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Jakarta Barat berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk efektifitas pengukuran dan pelaporan kinerja maka kinerja Sekretariat diukur secara terpisah dengan kinerja KPU Kota Jakarta Barat. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengukuran lebih obyektif dan fokus pada tugas dan fungsi antara Sekretariat dengan KPU. Dengan demikian diharapkan hasil pengukuran dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat selama Tahun Anggaran 2024. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 merupakan komparasi dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Payung Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dalam menjalankan mempunyai tugas dan fungsi yang berpedoman pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU No 14 tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota menjelaskan bahwa Sekretariat KPU Kota adalah Lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu **kota** kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kota.

Tugas Sekretariat

Yang dimaksud dalam Pasal 228 Peraturan KPU No 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 229 Sekretariat KPU Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.Struktur Organisasi

KPU Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Berikut adalah masing-masing tugas tiap sub bagian :

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pelaporan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan

anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- d. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

**DAFTAR NAMA KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
PERIODE 2024-2028**

NO	NAMA	JABATAN
1	ENDANG ISTIANTI	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	REZA FAJRIN	Anggota merangkap Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
3	SUBRO MALISI	Anggota merangkap Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	JAJA SULAIMAN	Anggota merangkap Divisi Teknis Penyelenggaraan
5	OBED SAKTI ANDRE DOMINIKA	Anggota merangkap Divisi Hukum dan Pengawasan

**DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
PERIODE 12 NOVEMBER SD 31 DESEMBER 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	Adnal Nurba Tjenreng, SH	Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat
2	Reza Khairul Lesmana, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Fitri Kumala, S.Sos, M.Si(Han)	Kasubbag Parhumas dan SDM
4	Ismiati Nurul Habibah, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
5	Widiawati, S.E., M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum
6	R.R. Ernawati, S. Sos	Staf Pelaksana

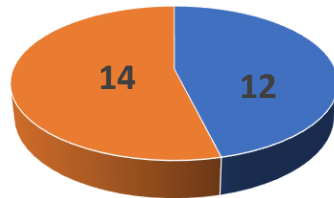
7	Novi Dayanti, S.IP	Staf Pelaksana
8	Meuthia Hafizhah, ST	Staf Pelaksana
9	Pramudya Wibowo, S.Kom	Staf Pelaksana
10	Aris Dwi Prasetyo, S.Kom	Staf Pelaksana
11	Nur Putri Dewi, A.Md	Staf Pelaksana
12	Hairi	Staf Pelaksana
13	Hendrik	Staf Pelaksana
14	Agus Pawito	Staf Pelaksana
15	Ramin Patuh Rahman	Staf Pelaksana

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN
1	Anto Listyo	Jagat Saksana
2	Eko Sunaryo	Jagat Saksana
3	Deni Hakiki	Jagat Saksana
4	Eko Budi Santoso	PPNPN
5	Tubagus Hariri	PPNPN
6	Keymal Azizy	PPNPN
7	Agus Hadi Haryanto	PPNPN
8	Abdul Azis	PPNPN
9	Abdul Kaffi Zuhair Ruhiyat	PPNPN
10	Muhammad Alwi Hidayat	PPNPN
11	Enno DY	PPNPN
12	Moh. Andri	PPNPN

KPU Kota Jakarta Barat memiliki aset Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian terpenting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada Tahun 2024 jumlah sumber daya manusia Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat sejumlah 14 PNS. dan 12 PPNPN.

INFOGRAFIS
SUMBER DAYA MANUSIA
KPU KOTA JAKARTA BARAT
TAHUN 2024



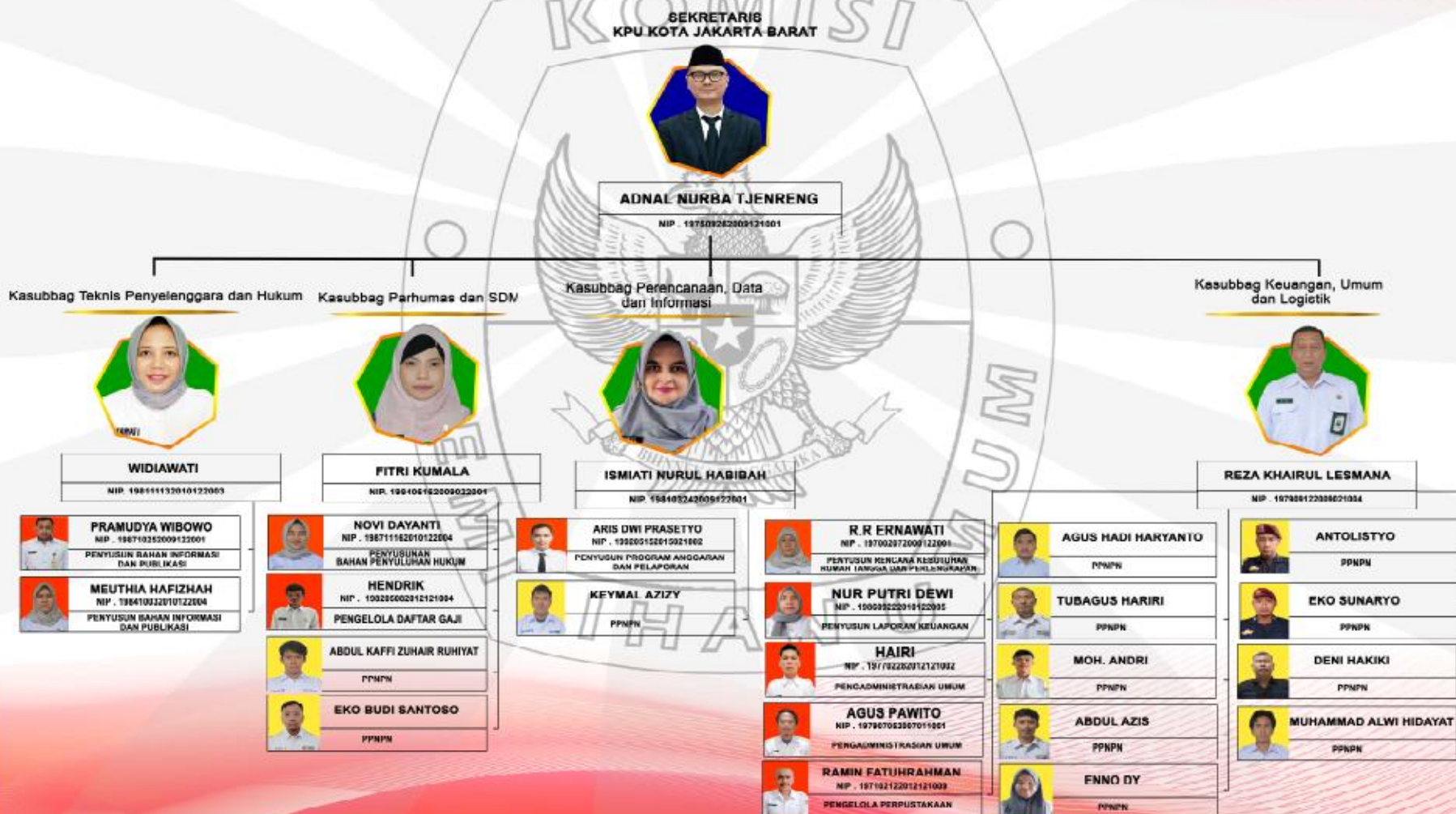
■ PPNPN ■ PNS



STRUKTUR ORGANISASI



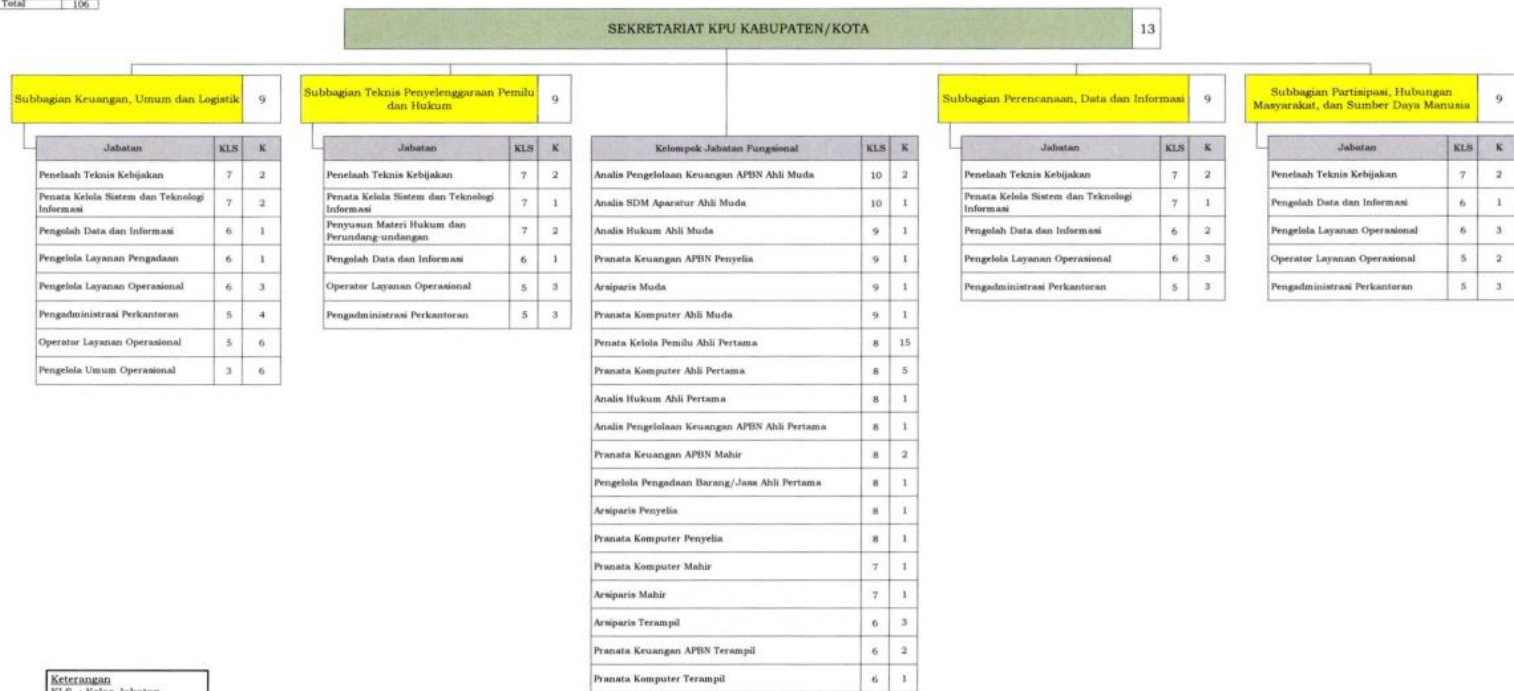
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT



Peta Jabatan KPU di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No.464 Tahun 2024

P. PETA JABATAN KABUPATEN/KOTA

No	Jabatan	K
1	Enclon I	0
2	Enclon II	0
3	Enclon III	1
4	Enclon IV	4
5	Pelaksana	59
6	Pangantun	52
	Total	106



Keterangan
KLS : Kelas Jabatan
K : Kebutuhan Pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plh. Plh. Kepala Biro Perundang-Undangan,
Deny Chrysawati

SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

D.SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Jakarta Barat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Jakarta Barat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



SUARA KITA
MASA DEPAN
JAKARTA

Rabu
27
November
2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Jakarta Barat Nomor : 054/HK.03.1-Kpt/3173/KPU-Kota I/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa Visi KPU Kota Jakarta Barat adalah :

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI,
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”**

dan Misi dari KPU Kota Jakarta Barat ada 6 poin penting diantaranya :

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundangundangan dan kode etik penyelenggaraan pemilu.
2. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan Teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 4 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat pada akhir periode perencanaan Tahun 2024. Adapun uraian, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Output Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan/ Output	Sasaran Output	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses KonsolidasiDemokrasi.							
1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan,pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.							
a. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria.							
	Tersedianya sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan sistematkan dan standar pengiriman logistik.	-	-	-	95%	95%
Program/ Kegiatan/ Output	Sasaran Output	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal							
	Tersedianya Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	-	-	-	95%	95%
		Persentase pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.	-	100%	100%	-	-
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal							
	Tersedianya inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan yang Berkaitan denganPenyelenggaraan Pemilu.							
- Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya pelayanan adminisrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.	Jumlah rapat koordinasi dengan Parpol peserta Pemilihan Umum.	-	1 kegiat an	1 kegiat an	1 kegiat an	2 kegiat an
3. Data dan Informasi Publik.							
- Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya dokumentasi daninformasiproduk hukum.	Persentase pengelolaan JDIH di tingkat KPU Kabupaten/Kota.	-	100%	100%	100%	100%
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, PemiluPresiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi danSosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.							
a. Pelayanan Publik Lainnya.							
	Tersedianya dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	-	100%	100%	100%	100%

b. Data dan Informasi Publik.							
	Tersedianya publikasi informasi	Persentase penerbitan bahan informasi dan klipingKepemiluan dan Pilkada.	-	-	-	100%	100%
II. Program Dukungan Manajemen.							
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan AdministrasiKeuangan di Lingkungan Setjen KPU.							
a. Layanan Perkantoran.							
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	Persentase ketepatan waktu pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	100%	100%	100%	100%	100%
b. Layanan Pengawasan Internal.							
	Terlaksananya Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan.	Persentase penyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Terlaksannnya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
2. Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.							
a. Layanan Data dan Informasi.							
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.	Persentase pemutakhiran data pemilih.	-	100%	100%	100%	100%
b. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.	Persentase penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.							
	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran.	Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana.							
a. Layanan Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawaiyang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
b. Layanan Sarana Internal							
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPUProvinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.							

- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal di lingkungan KPU.	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	100%	100%	100%	100%	100%

B. Prioritas Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RKP) Tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik – Tematik, Integratif dan Spasial. Hal ini memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program, prioritas/kegiatan, prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang bermanfaat untuk publik, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan pada Pemilu/Pemilihan.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu.	100%
2.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan Kelembagaan demokrasi.	3 lembaga

3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Jakarta Barat yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase penyusunan dokumen SAKIP.	100%
		Persentase penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.	100%
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase penyampaian Reformasi Birokrasi dengan Tepat Waktu.	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
7.	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM.	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	100%
8.	Tersedianya data dan informasi pegawai KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase pegawai yang dicatat secara akurat oleh data base KPU.	95%
9.	Terwujudnya pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase Badan Adhoc penyelenggara Pemilu yang telah terbentuk.	100%
10.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Penetapan Keputusan KPU Kota Jakarta Barat	100%
		Persentase Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) melalui Media Sosial	80%

11.	Terlaksananya Penanganan sengketa Hukum Pemilu/Pemilihan	Jumlah Penanganan Sengketa Hukum	2 laporan
12.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase pelaksanaan SPIP secara efektif dan efisien.	100%
		Persentase penyusunan Laporan Keuangan yang dapat diandalkan	100%
		Persentase aset Negara yang tersimpan secara aman	100%
13.	Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	100%
14.	Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
15.	Tersedianya dokumen pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
16.	Terwujudnya dukungan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase dukungan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
17.	Terwujudnya dukungan fasilitasi pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase dukungan fasilitasi pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
18.	Tersusunnya laporan Bakohumas dan Siparmas tahun 2024	Jumlah dokumen laporan bakohumas dan siparmas Tahun 2024	2 laporan
19.	Tersedianya pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	100%
20.	Terwujudnya system akuntansi dan pelaporan keuangan.	Persentase penyelesaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Jakarta Barat	100%
21.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase penyelesaian Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%

22.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	100%
23.	Terwujudnya peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.	100%
24.	Terwujudnya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase kekurangan dalam pemenuhan logistik	10%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara.	100%
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu.	100%

D.Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah ditandatangani pada Bulan Januari 2024, ditetapkan Rencana dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen, dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kota Jakarta Barat mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp 132.161.092.000

PAGU ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	PAGU
		(Rp)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2.733.550.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM DEMOKRASI	129.427.542.000

PAGU ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2024

NO	KETERANGAN	PAGU
		(Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2.545.201.000
2	BELANJA BARANG	188.349.000
3	BELANJA MODAL	1.014.092.000

Adapun Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	129.427.542.000
* Teknis Penyelenggaraan	1.000
* Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.483.353.000
* Pembentukan Badan Adhoc	100.326.122.000
* Masa Kampanye	113.840.000
* Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	11.315.975.000
* Pemungutan dan Penghitungan Suara	16.177.279.000
* Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/kota	3.000
* Penetapan Hasil Pemilu	10.969.000
Program Dukungan Manajemen	2.733.550.000
*Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.545.201.000
*Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	188.349.000

Terlampir Pagu alokasi Program Kegiatan Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



SUARA KITA
MASA DEPAN
JAKARTA

Rabu
27
November
2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024, pada dasarnya merupakan suatu bagian dari proses perencanaan kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk mencapai sasaran Rencana Strategi 2020-2024. Seluruh sasaran strategis yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat adalah merupakan kinerja tahun keempat pada periode Rencana Strategi 2020-2024. Hasil Pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.Mewujudkan KPU Kota Jakarta Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas.					
	Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Persentase pelaksanaan regulasi /peraturan yang dibuat oleh KPU RI.	90%	90%	96%
	Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas.	Persentase pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik	100%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas	Persentase penyusunan Laporan Keuangan dengan baik dan benar serta penyampaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu.	100%	100%	99%
		Keterbukaan informasi public	100%	100%	98%
2.Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.					

	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	98,00%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	96%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	97%

Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
Program/ Kegiatan/ Output	Sasaran Output	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data	100%	100%	98%
			Pemilih Berkelanjutan			
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,16%	0,16%	0,12%
			Tetap.			
I. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan						
1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan						
a. Norma, Standard, Prosedur						

	Tersedianya sistematis dan standar pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase pengiriman logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan sistematika dan standar pengiriman logistik.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	97%
--	---	--	--	------	------	-----

3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil .

	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kecamatan/Kelurahan yang aman dan damai	100%	100%	99%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	100%	100%	98%

Output	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					

	Tersedianya Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	95%	95%	98%
		Persentase pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan.	100%	100%	99
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal					
	Tersedianya inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	1lapo ran	1lapo ran	1lapo ran
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan yang Berkaitan denganPenyelenggaraan Pemilu.					
- Pelayanan Publik Lainnya.					
	Tersedianya pelayanan adminisrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.	Jumlah rapat koordinasi dengan Parpol peserta Pemilihan Umum.	2 kegiat an	2 kegiat an	3 kegiat an
3. Data dan Informasi Publik.					
- Pelayanan Publik Lainnya.					

	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	Persentase pengelolaan JDIH di tingkat KPU Kabupaten/Kota.	100%	100%	100%
4. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kader, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW.					
a. Pelayanan Publik Lainnya.					
	Tersedianya dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	Persentase pengelolaan dokumentasi teknis Pemilu/Pemilihan.	100%	100%	100%
b. Data dan Informasi Publik.					
	Tersedianya publikasi informasi	Persentase penerbitan bahan informasi dan kliping Kepemiluan dan Pilkada.	100%	100%	100%
II. Program Dukungan Manajemen.					
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.					
a. Layanan Perkantoran.					
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	Persentase ketepatan waktu pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	100%	100%	100%
b. Layanan Pengawasan Internal.					
	Terlaksananya Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan.	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	100%	100%	100%

		(e-LPPA) yang tepat waktu dan valid			
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.					
	Terlaksanannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
2. Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.					
a. Layanan Data dan Informasi.					
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.	Persentase pemutakhiran data pemilih.	100%	100%	100%
b. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.					
	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.	Persentase penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.	100%	100%	100%
c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.					
	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran.	Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.	100%	100%	100%
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana.					
a. Layanan Perkantoran					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
b. Layanan Sarana Internal					

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 dok	1 dok	1 dok
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.					
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.					
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal di lingkungan KPU.	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Terfasilitasinya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yaitu diukur dengan terlaksananya kegiatan verifikasi administrasi, verifikasi faktual calon partai politik, hingga telah diterbitkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Partai Politik serta penggunaan Sistem Informasi Politik. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 96 %, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 96 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 98,04%.
2. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan yaitu diukur dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi PKPU yang mengatur tentang pencalonan DPD untuk Pemilu tahun 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.
3. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yaitu diukur dengan memfasilitasi kebutuhan bimbingan teknis terhadap mitigasi dan persiapan menghadapi potensi sengketa yang muncul di masa Tahapan Pemilu 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99,62 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah ,81%.
4. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Penyusunan Peraturan Pemilu yaitu diukur

dengan cara tersusunnya seluruh Surat Keputusan maupun Berita Acara sesuai dengan Rapat Pleno Rutin setiap hari senin maupun setiap kali terdapat kebutuhan mendesak, serta kebutuhan dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99,62 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,31%.

5. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi

Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan yaitu diukur dengan cara terfasilitasi seluruh kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dari beberapa tahapan Pemilu Tahun 2024 ini. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99,86 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,93%.



6. Jumlah Kesadaran Pemilih dalam Pemilu yg hadir ke Tempat Pemungutan Suara. Jika dilihat secara kinerja capaiannya 77 % dan dinilai dari kegiatannya sebesar 77,54%, sehingga rata-rata meliebihi target rencana strategis jangka menengah.

Data Pemilih yaitu diukur dengan cara terfasilitasinya kegiatan pemutakhiran data pemilih hingga tersusunnya laporan akhir DPT Pemilu 2024 di Bulan Juni 2023. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 99%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.



Terfasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran

7. Jumlah Lembaga yang

terfasilitasi Perencanaan dan



Penganggaran Pemilu, yaitu diukur dengan cara

terfasilitasinya kebutuhan anggaran dan keuangan selama menjelang dan memasuki tahapan pemilu di tahun anggaran 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99 %, sehingga rata- rata capaian untuk indikator ini adalah 99%.

8. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Logistik Pemilu yaitu dapat diukur dengan tersampainya pendataan seluruh perkiraan kebutuhan logistik untuk Pemilu Tahun 2024. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 97,46 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 98,73%.
9. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc, yaitu diukur dengan terfasilitasi segala tahapan mulai dari perekrutan, tes tulis, tes wawancara hingga pelantikan badan adhoc. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 100%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 100%.
10. Terlaksananya pengelolaan Kampanye Pemilu, maka capaian 100%, dan realisasi anggaran 100%, dengan demikian indicator rata-rata 100%.
11. Jumlah Unit yang terfasilitasi Sarana IT Pemilu yaitu diukur dengan terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana, seperti kursi dan meja rapat, maupun meja kursi untuk pegawai, serta Laptop dan printer pegawai. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 96 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 86,00%.

Tabel Laporan BMN berdasarkan Aplikasi SAKTI
Periode Desember 2024

KODE	URAIAN		KUANTITAS
1	2	3	4
132111	Peralatan dan Mesin		442,
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	6,
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	2,
3050201009	Meja Komputer	Buah	4,
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0,
3050204001	Lemari Es	Buah	4,
3050204006	Kipas Angin	Buah	3,
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1,
3050206045	Coffee Maker	Buah	1,
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1,
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	2,
3050206007	Loudspeaker	Buah	3,
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2,
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1,
3100203010	CD Writer	Buah	1,
3150302005	Tenda	Buah	1,
3100102003	Note Book	Buah	4,
3050205028	Teko Non Listrik	Buah	0,
3050201022	Partisi	Buah	11,
3050206071	Kabel	Buah	1,
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4,
3050205006	Oven Listrik	Buah	0,
3050206014	Microphone	Buah	2,
3060102128	Camera Digital	Buah	1,
3060319001	Switcher Combination	Buah	1,
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1,
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	23,
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	17,
3080133010	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	Buah	0,
3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dummy	2,
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2,
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	5,
3050105084	Alat Penerjemah	Buah	1,
3050204007	Exhaust Fan	Buah	8,
3060102056	Film Projector	Buah	1,
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	1,
3050206085	Tempat Sampah	Buah	0,
3020201009	Baggage Trolley	Unit	5,
3020101003	Station Wagon	Unit	1,
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	0,
3050105049	Flip Chart	Buah	2,
3050201005	Sice	Buah	1,
3050206056	Karpet	Buah	1,
3050206002	Televisi	Buah	21,
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	1,
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	7,
3100204024	Switch	Buah	2,
3100102001	P.C Unit	Buah	22,
3100102002	Lap Top	Buah	31,
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1,
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1,
3050104020	Lemari Display	Buah	1,
3050201008	Meja Rapat	Buah	32,
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2,
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	2,
3050206070	Tangga	Buah	1,
3050206072	Lampu	Buah	1,
3050206082	Home Theater	Buah	1,
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2,
3060201004	Telephone Mobile	Buah	2,
3100201012	Hard Disk	Buah	1,
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3,
3030205001	Tool Kit Set	Buah	1,
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	88,
3050204004	A.C. Split	Buah	22,

3050206020	Camera Video	Buah	1,
3050206030	Tiang Bendera	Buah	10,
3050205001	Kompas Listrik (Alat Dapur)	Buah	0,
3050205004	Teko Listrik	Buah	0,
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	1,
3050206012	Wireless	Buah	3,
3050105039	Display	Buah	2,
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1,
3090402007	Tongkat POLRI	Buah	3,
3100102009	Tablet PC	Buah	1,
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1,
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2,
3050104007	Brandkas	Buah	2,
3060101031	Intercom Unit	Buah	0,
3050206036	Dispenser	Buah	4,
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1,
3050206008	Sound System	Buah	1,
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1,
3060323015	Switcher/Patch Panel	Buah	2,
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	17,
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2,
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2,
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	8,
3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1,
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	3,
3060201010	Facsimile	Buah	1,
135111	Aset Tetap Renovasi		1,
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	1,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		13,
3050206046	Handy Cam	Buah	2,
3100102001	P.C Unit	Buah	7,
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0,
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	0,
3060102003	Camera Electronic	Buah	1,
3100102009	Tablet PC	Buah	1,
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2,

Sarana dan Prasarana Kantor KPU Kota Jakarta Barat



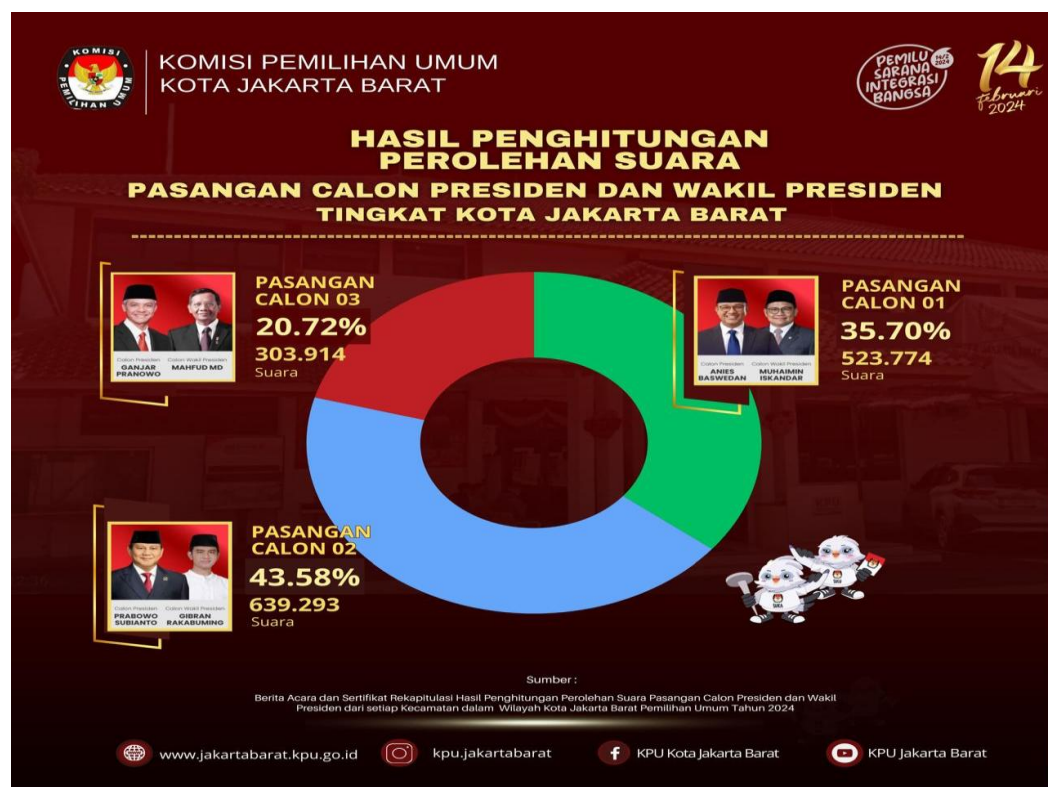


12. Jumlah Layanan Pemenuhan Pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu dapat diukur dengan terbayarnya secara rutin dan tepat waktu untuk pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai KPU Kabupaten Jakarta Barat di tahun 2022. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 99,67 %, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,68%.
13. Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, yaitu dapat diukur dengan terfasilitasinya segala kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor. Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian anggarannya adalah 96,96%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 98,48 %.
13. Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang berbasis teknologi dengan capaian 100%, anggaran 99,9%, sehingga rata-rata capaian 99%.



Keterangan Gambar : Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berikut terlampir hasil perolehan Pemilu Presiden yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 14 Februari 2024



Berikut adalah Hasil Perolehan Pemilu Legislatif, yang dilaksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024.



Program Dukungan Manajemen, dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kota Jakarta Barat mendapat pengalokasian anggaran sebesar Rp 132.161.092.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 132.044.903.556 atau sebesar 99,91 % dari pagu anggaran (data per 31 Desember 2024).

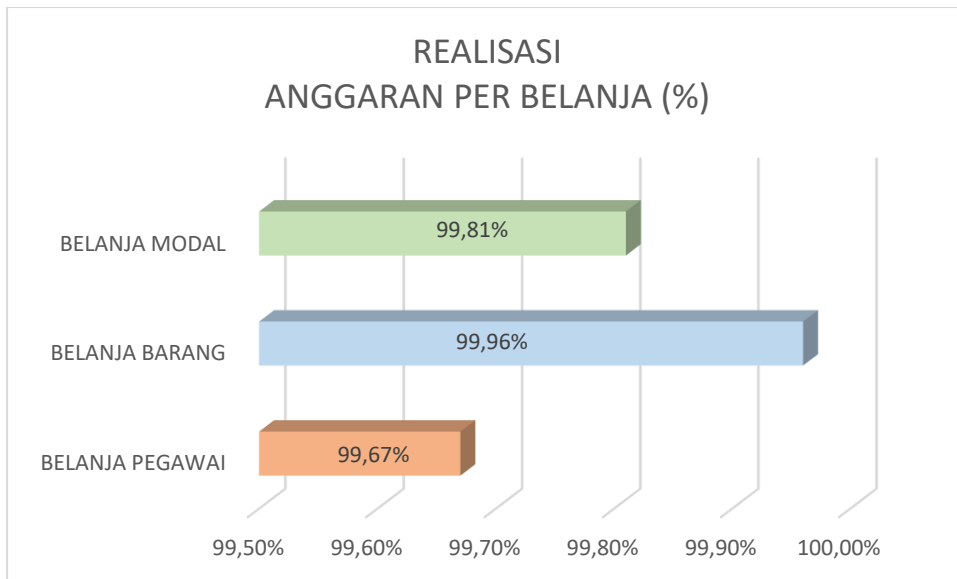
Realiasi Anggaran KPU Tahun 2024 dengan Tabel Berikut ini :



PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 BERDARAKAN PROGRAM ANGGARAN

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2.733.550.000	2.725.003.936	99,69%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM DEMOKRASI	129.427.542.000	129.319.899.620	99,92%

Keterangan Gambar diatas adalah alokasi pagu anggaran 2024 dan realisasi berdasarkan program anggaran.



**PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN
2024 BERDARKAN JENIS BELANJA**

NO	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	BELANJA PEGAWAI	2.545.201.000	2.725.003.936	99,67%
2	BELANJA BARANG	188.349.000	129.319.899.620	99,96%
3	BELANJA MODAL	1.014.092.000	1.012.161.256	99,81%

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	129.427.542.000	129.319.899.620	99,92%
* Teknis Penyelenggaraan	1.000	-	0%
* Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.483.353.000	1.411.365.610	95,15%
* Pembentukan Badan Adhoc	100.326.122.000	100.324.286.869	100%
* Masa Kampanye	113.840.000	113.840.000	100%
* Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	11.315.975.000	11.288.831.017	99,76%
* Pemungutan dan Penghitungan Suara	16.177.279.000	16.170.614.724	99,96%

* Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	3.000	-	0%
* Penetapan Hasil Pemilu	10.969.000	10.964.400	99,96%
Program Dukungan Manajemen	2.733.550.000	2.725.003.936	99,69%
*Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.545.201.000	2.536.734.836	99,67%
*Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	188.349.000	188.269.100	99,96%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan metode pelaporan keempat dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Pada tahun 2024, KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp. 132.161.092.000,- (seratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 132.044.903.556,- (seratus tiga puluh dua milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dimana masih terdapat sisa anggaran Rp 116.188.444 (seratus enam belas ribu seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga realisasi Tahun 2024 sebesar 99,91%.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja KPU Kota Jakarta Barat di tahun yang akan datang, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dokumen Laporan Kinerja perlu dilakukan reviu internal secara berkala.
2. Melakukan monitoring evaluasi realisasi anggaran secara berkala.
3. Memperbanyak pelatihan/bimbingan teknis terkait pemahaman penyusunan perencanaan kinerja.
4. Melakuakn evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Kota Jakarta Barat.

